

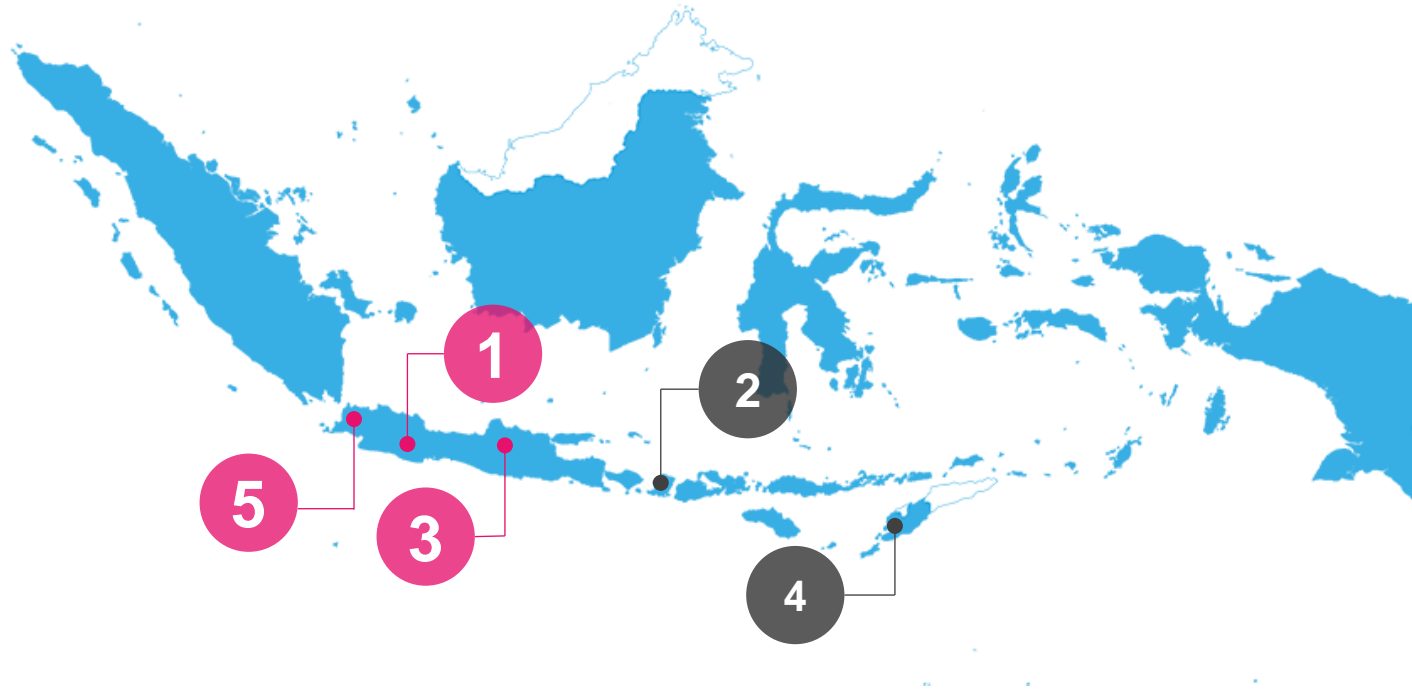


Catatan LPSK Dalam Penanganan TP Perdagangan Orang

30 Juli, Hari Anti Perdagangan Orang se-Dunia



Daerah Kantong Korban TPPO



4 Tahun, 318 Korban



Dalam kurun 2016-2019, LPSK memberikan perlindungan terhadap 318 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Lima Daerah Kantong TPPO



Lima provinsi tercatat sebagai daerah terbanyak asal domisili korban TPPO, yaitu Jabar, NTB, Jateng, NTT dan Banten.

Bukan Peta Korban Nasional



Data merujuk kepada domisili korban. Tidak sepenuhnya menggambarkan peta korban secara nasional.

Jawa Barat

118 korban

Nusa Tenggara Barat (NTB)

42 korban

Jawa Tengah

32 korban

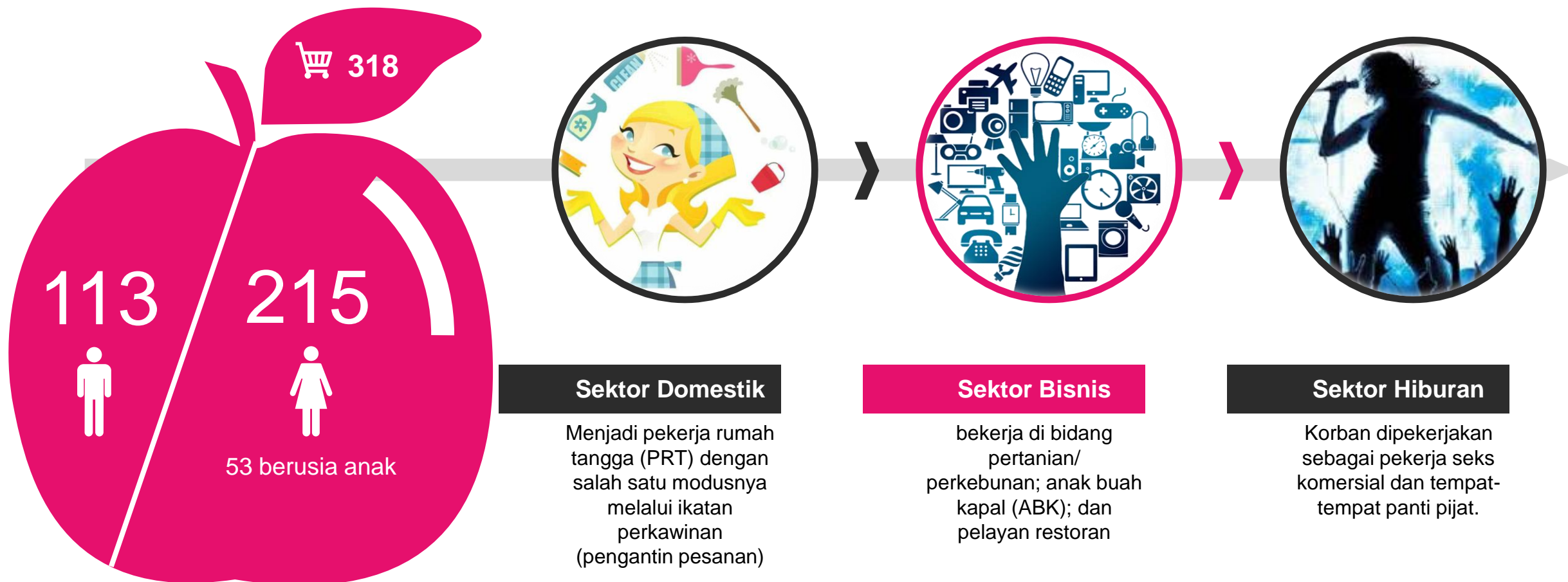
Nusa Tenggara Timur (NTT)

27 korban

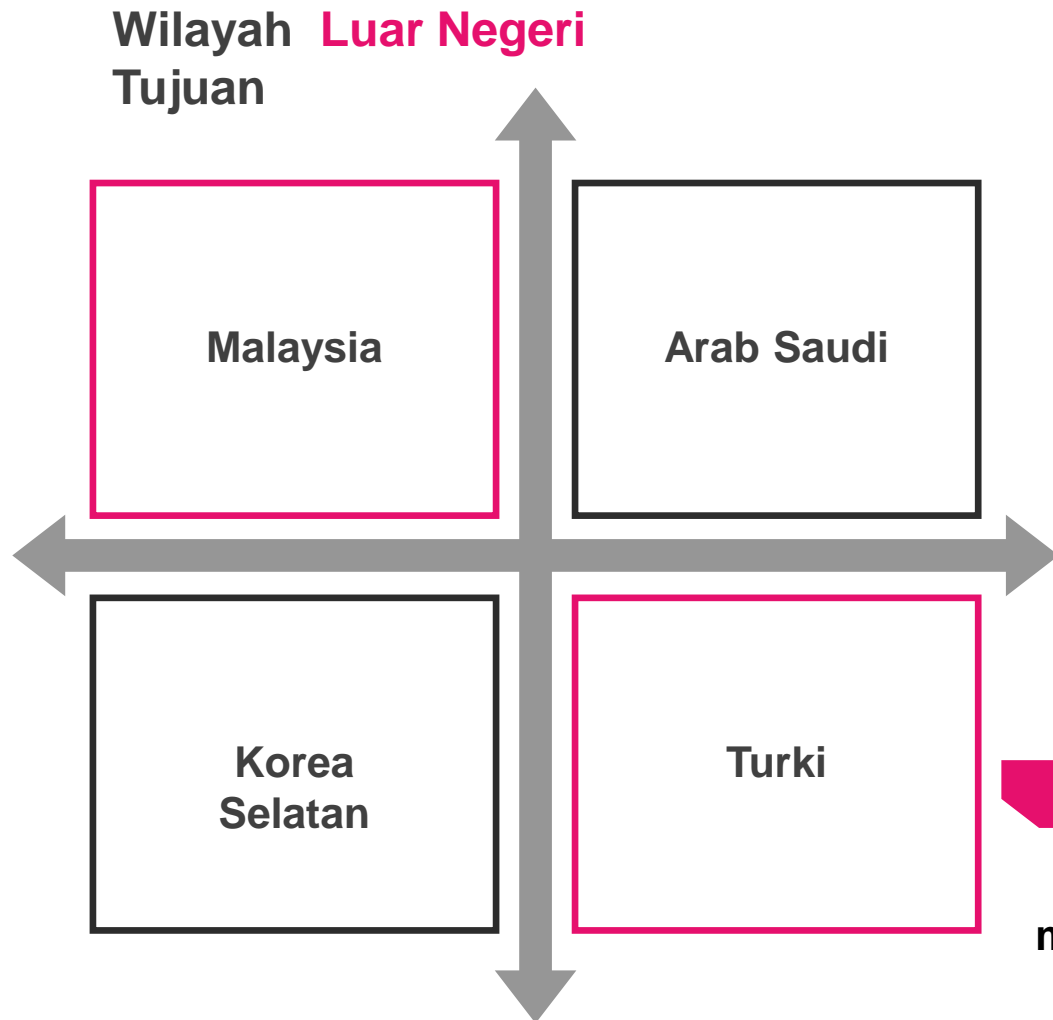
Banten

16 korban

Klasifikasi Korban dan Pekerjaan



Wilayah Tujuan Perdagangan Orang



Fakta Menarik: Daerah tujuan perdagangan orang juga menyasar negara konflik, seperti Suriah dan Sudan dan Sudan.



GAJI TINGGI

Pelaku menjanjikan penghasilan yang besar.



JERAT HUTANG

Memberikan pinjaman kepada pihak keluarga.



PEKERJAAN LAYAK

Pelaku menjanjikan pekerjaan yang layak.



PERKAWINAN

Beberapa cara lain seperti melalui perkawinan

Faktor ekonomi paling dominan penyebab seseorang menjadi korban TPPO.

Faktor itu tidak terlepas dari faktor pendidikan (putus sekolah) yang menempatkan korban dalam lingkaran perdagangan manusia.

Rekomendasi LPSK Tangani TPPO

Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada wilayah-wilayah asal korban TPPO, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan.

PERHATIAN PEMERINTAH

Dorongan melakukan percepatan proses *single identity* dan terkoneksi pada seluruh layanan kependudukan dan perizinan di seluruh Indonesia untuk cegah pemalsuan dokumen.

SINGLE IDENTITY

KAMPANYE

Perlu dilakukan kampanye anti-perdagangan orang yang efektif agar masyarakat dapat mengenali dan mencegah terjadinya tindak pidana ini

BAYAR RESTITUSI

TINDAK PELAKU

Para pelaku sebaiknya tidak diberikan hak-hak narapidana (remisi, pembebasan bersyarat) apabila mereka tidak membayarkan restitusi kepada korban.

Mendorong penegak hukum meningkatkan profesionalitas dalam melakukan penindakan (agar pelaku pelaku utama dalam sindikat perdagangan orang dapat dipidanakan).

